



Buletin

Parlementaria

Nomor 996/IV /II/2018 • Februari 2018



DPR Tindaklanjuti

Investigasi Longsor Soetta

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



9 772614 339009

DPR Institusi Paling Transparan

DPR Tindaklanjuti Investigasi Longsor Soetta



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Fary Djemie Francis melihat foto-foto tragedi longsornya *underpass* Jalan Parimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mendorong kementerian terkait untuk melakukan investigasi dan evaluasi longsornya *underpass* Jalan Parimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten yang menelan korban jiwa, sambil menunggu hasil investigasi dari Penilai Ahli Komite Keselamatan Konstruksi.

“Kami ingin hasil investigasi bersifat transparan dan dibuka ke publik. Karena kami curiga pembangunan yang dituntut cepat selesai ini, berakibat pada kurang sempurnanya aspek desain awal, pelaksanaan, sampai pengawasan konstruksi,” kata Fary Djemi Francis saat meninjau bekas longsor di Jalan Parimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (19/2).

Politisi F-Gerindra itu juga menyalahkan adanya keterlambatan penanggulangan bencana, dalam hal ini penyelamatan terhadap korban yang

Karena kami curiga pembangunan yang dituntut cepat selesai ini, berakibat pada kurang sempurnanya aspek desain awal, pelaksanaan, sampai pengawasan konstruksi

tertimbun longsor tersebut. “Jika lebih cepat saja informasi itu disampaikan

kepada Basarnas oleh pihak bandara mungkin korban bisa tertolong,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi V DPR RI setelah masa reses ini akan mengadakan rapat dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan atas kejadian longsor di *underpass* Jalan Parimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Politisi dari dapil NTT ini juga meminta seluruh masyarakat untuk selalu sigap dan siaga mengantisipasi kondisi sebelum datang musibah. “Kita semua harus selalu tanggap bencana, agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, sebagai wujud kesiapsiagaan kita agar musibah tidak terulang kembali,” pungkasnya. ■ ANDRI/SC

Fadli Zon Kecam Penyerangan Ulama

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengancam keras penyerangan terhadap ulama yang kembali terjadi di Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur pada Minggu (18/2) lalu. Penyerangan tersebut dialami oleh Pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, KH. Hakam Mubarak.

“Ini polanya terlihat masif, terstruktur dan juga sistematis. Masif disini artinya ada di berbagai tempat dan banyak kasus”

Politisi F-Gerindra itu menegaskan, hal tersebut harus diusut tuntas dan mendapatkan perhatian lebih dari aparat, karena peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi.

“Ini polanya terlihat masif, terstruktur dan juga sistematis. Masif disini artinya ada di berbagai tempat dan banyak kasus,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2).

Selain peristiwa yang terjadi berulang, Fadli menilai penegak hukum dirasakan tidak hadir, serta tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Dampaknya, masyarakat akan mencari jalannya sendiri untuk melindungi diri mereka.

“Apa lagi ini adalah para ustadz, dimana mereka adalah tokoh masyarakat setempat. Saya kira ini harus diusut tuntas dan jangan sampai terulang di tempat lainnya,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai perlunya badan intelijen dalam menangani hal ini, Fadli menyatakan bahwa hal itu sangat diperlukan, karena ini untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat luas.

“Pasti dan harus otomatis ya. Karena disaat kita mendapat informasi mengenai akan terjadinya suatu penyerangan, hal-hal itu bisa diatasi sebelum terjadi,” tutup politisi asal dapil Jawa

Barat itu. ■
(ILA/SF)



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,
Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI
Bagus Mudjiharjanto, Luthfi Suci Nur Aini,
Damar Maulana Taher
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom, Erman Suhendri, S.Sos.I,
Mustaqim, S.Kom.I
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers

(FOTORUNI)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat mengunjungi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk berdiskusi dan bersilaturahmi

Kebebasan Pers Bertanggung Jawab Tetap Hidup di DPR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjamin Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tidak akan memberangus kebebasan pers. Bahkan, Insan pers diminta untuk lebih kritis kepada DPR dengan tujuan untuk membangun DPR lebih baik lagi.

Hal itu ditekankan Bamsot, panggilan akrabnya, saat berkunjung dan bersilaturahmi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk berdiskusi dengan para sahabat dan para seniornya di PWI guna mendengar masukan dan mensosialisasikan UU MD3, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2).

“Banyak informasi yang beredar bahwa UU MD3 membatasi ruang gerak masyarakat maupun pers dalam mengawasi dan memberikan kritik terhadap DPR. Saya tegaskan hal ini

tidak benar. Saya menjamin kebebasan pers tetap terjaga di DPR. Saya juga yakin wartawan di DPR sudah lulus kompetensi sehingga menjunjung tinggi kode etik,” ujar Bamsot lebih lanjut.

Politisi F-PG itu menyadari UU MD3 masih banyak mendapatkan pro kontra di kalangan masyarakat. Karenanya, Bamsot membuka ruang dan mempersilakan bagi pihak yang ingin menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

“Menggugat sebuah UU ke MK adalah hak masyarakat yang dijamin

oleh hukum. Termasuk insan pers. Saya hormati dan persilakan bagi yang ingin menggugat UU MD3. Apapun putusan MK, DPR akan taat hukum dan taat asas,” tutur Bamsot.

Tak lupa, Bamsot mengajak awak media terus menjaga kearifan dan kebijaksanaan dalam memberitakan suatu peristiwa kepada masyarakat. Keutuhan informasi menjadi sebuah hal yang sangat penting, agar media tidak *miss* informasi.

“Kami datang kesini dengan niat baik memberikan berbagai sudut pandang dari disahkannya UU MD3. Kami harap penjelasan ini nantinya bisa melengkapi keutuhan informasi bagi kawan-kawan media dalam melihat posisi UU MD3. Ke depan, kita akan melibatkan insan pers dalam pembahasan



FOTO :JAVADI

RUU di DPR,” kata Bamsuet.

Dalam kesempatan itu, Plt Ketua Umum PWI Sasongko Tedjo menyambut baik kedatangan Ketua DPR ke Dewan Pers. Ia mengatakan, PWI berharap bisa dilibatkan dalam pembahasan RUU yang sedang dibahas di DPR.

“Silaturahmi Ketua DPR ke PWI ini merupakan suatu langkah baik. Tadi banyak masukan dari rekan-rekan PWI terkait dengan UU MD3. Kedepannya, kita berharap DPR bisa melibatkan insan pers dalam pembahasan RUU,” ujar Sasongko.

Dalam acara tersebut, hadir juga Pengurus PWI yang lain, diantaranya Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Penasehat Sholeh Thamrin, Sekretaris Dewan Kehormatan Wina Armada, Sofyan Lubis, Zainal Bintang, Tri Buana Said, Marah Sakti, Agus Sudibyo, Teguh dan sejumlah tokoh senior pers lainnya. ■ (MHR/SF)



FOTO:JAKA

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memberikan keterangan pers

DPR Apresiasi Pengungkapan Narkoba oleh Penegak Hukum

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengapresiasi setinggi-tingginya kepada aparat penegak hukum, terutama Kepolisian, Bea dan Cukai, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,6 ton di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/2) lalu.

Menurut Agus, hal ini akan menjadi pembelajaran bagi oknum-oknum yang akan menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Penyelundup pasti akan berpikir ulang dan lebih panjang lagi untuk menyelundupkan, karena penegak hukum di Tanah Air sangat siap dan sigap dalam melaksanakan pemberantasan narkoba dengan tepat.

“Penangkapan yang telah terjadi kemarin sudah seharusnya memberikan hal yang baik dalam pemberantasan narkoba di negeri ini. Tentunya kita harapkan ke depan tidak akan terjadi lagi, karena kami yakin aparat kita cukup siap dan sigap untuk melaksanakan hukum dengan baik dan tepat,” kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2).

Politisi Partai Demokrat itu meyakini, bahwa aturan hukum di Indonesia sudah sangat berat dan tepat dalam memberikan efek jera terhadap

penyelundupan narkoba, terlebih sudah ada beberapa pihak yang tertangkap dan dihukum mati sehingga ancamannya sudah sangat kuat.

Agus juga mengimbau semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat luas, harus dengan sungguh-sungguh turut serta memberantas narkoba dan meningkatkan lagi keamanannya. Bahkan, semua juga harus memberikan efek jera yang cukup kuat terhadap pengedar narkoba yang sekarang ini masih marak, terutama di kalangan artis.

“Dengan banyaknya peredaran narkoba disini, kita juga harus mengerti adanya teori ekonomi *supply* dan *demand*. Dan disini saya kira demand sangat tinggi, akhirnya pihak-pihak yang melakukan *supply* berani untuk bertaruh nyawa,” tutup politisi asal dapil Jateng itu. ■ (ILA/SF)

Kontraktor Infrastruktur Diminta Perhatikan Aspek K3 dan SOP

Kecelakaan kerja pada proyek pembangunan infrastruktur kembali terjadi. Kali ini, tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur pada Selasa (20/2) dini hari, ambruk. Ironisnya, insiden ini menjadi salah satu kecelakaan kerja ke tujuh dalam pembangunan infrastruktur pada kurun waktu enam bulan terakhir.



FOTO:ARIEF

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat memberikan keterangan pers

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur untuk mengedepankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Standard Operating Procedure (SOP). Menurutnya, konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas dalam setiap proyek pembangunan, harus bekerja secara profesional, dan mempertanggungjawabkan Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (Studi Kelayakan).

“Setiap pelaksanaan proyek selalu ada konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas. Ketiganya harus bekerja secara profesional, jangan

sampai ada salah pada Feasibility Study. Atau jangan sampai terjadi kesalahan pada DED, itu harus selalu dalam supervisi Kementerian PUPR,” tegas Taufik kepada Parlemen, di Gedung DPR RI,

“Kami berharap Kementerian PUPR meningkatkan pengawasan kepada kontraktor yang melaksanakan pembangunan infrastruktur. Jangan sampai mengejar target, tapi mengabaikan keselamatan”

Senayan, Jakarta, Selasa (20/2).

Politisi F-PAN itu menambahkan, BUMN karya terkait, yakni perusahaan BUMN yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN. Terkait kecelakaan kerja ini, ia mendorong dilaksanakan rapat gabungan antara Komisi V DPR, Komisi VI DPR, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN.

“Banyak hal yang harus diselidiki lebih lanjut. Kami berharap Kementerian PUPR meningkatkan pengawasan kepada kontraktor yang melaksanakan pembangunan infrastruktur. Jangan sampai mengejar target, tapi mengabaikan keselamatan,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Akibat berbagai kecelakaan kerja ini, akhirnya Pemerintah akan menghentikan (moratorium) sementara semua proyek infrastruktur elevated, pasca kecelakaan proyek Tol Becakayu. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur kerja menjadi prioritas. Terkait hal ini, jika dirasa diperlukan, Taufik mendukung kebijakan itu. Sehingga Pemerintah dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Diketahui, dalam kurun waktu enam bulan terakhir, setidaknya terjadi tujuh kecelakaan kerja pembangunan infrastruktur. Diantaranya, Proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan, Agustus 2017. Saat itu, dua unit crane dengan bobot 70 ton dan 80 ton yang sedang dioperasikan tiba-tiba jatuh dan mengenai sejumlah rumah.

Selain itu, Jembatan tol penyeberangan orang pada pengerjaan proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocimi di Kabupaten Bogor, September 2017, Girder box jatuh di proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur pada Oktober 2017. Selanjutnya, kasus jatuhnya crane di jalan tol Jakarta-Cikampek pada November 2017 dan ambruknya girder saat akan dipasang di proyek jalan tol Pemalang-Batang di Jawa Tengah, Desember 2017.

Kemudian, robohnya box girder atau beton Light Rapid Transit (LRT) di Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur pada Januari 2018 lalu. Akibatnya, lima orang terluka akibat kejadian itu. Kasus terakhir, tiang pancang proyek tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, roboh pada Selasa (20/2), pukul 03.00 WIB. Sebanyak tujuh pekerja tertimpa reruntuhan. ■ (SF)

DPR Institusi Paling Transparan

DPR dinilai sebagai institusi negara paling transparan saat ini. Transparansi dan akuntabilitas DPR sudah tak diragukan lagi. Peresmian klinik e-LHKPN beberapa waktu lalu oleh Ketua DPR RI membuktikan bahwa DPR punya semangat memerangi korupsi di internalnya sendiri.

Demikian penegasan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat diwawancara lewat sambungan telepon, Selasa (20/2). “Spirit yang dibangun Ketua DPR baru ingin menjadikan DPR sebagai parlemen modern yang dekat dengan rakyat sekaligus menjadi tumpuan rakyat dalam menghadapi berbagai masalah,” tegasnya.

Institusi dan lembaga lainnya harus menyontoh DPR dalam pemberantasan korupsi dan transparansi kebijakan. Bahkan, menurut politisi PDI Perjuangan ini, secara anatomi, sebetulnya DPR sudah “telanjang”. Artinya, sudah membuka diri setransparan mungkin agar publik mudah mengakses kebijakan dan apa saja yang sudah dilakukan DPR. Klinik elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

FOTO:DOEH

Negara (e-LHKPN) ini adalah salah satunya yang perlu diapresiasi publik.

“Dengan klinik e-LHKPN ini membuka ruang atau kanal-kanal akses publik untuk mendekati ke DPR. Kita juga sudah banyak membuka ruang, ada pos pengaduan dan terakhir membuka e-LHKPN ini. Kehadiran klinik e-LHKPN ini sangat bermanfaat. Tapi, sangat disayangkan kerja 560 anggota DPR yang begitu hebat, tidak terefleksikan atau terinformasikan dengan baik kepada publik,” kilah politisi dari dapil Jatim VI ini.

KPK diserukan Arteria mendukung aksi DPR ini. Ketika DPR sudah transparan dan akuntabel, KPK juga harus beraksi yang sama seperti DPR. Mayoritas anggota DPR sudah melaporkan LHKPN-nya kepada DPR. Bahkan, banyak anggota DPR yang dijadikan tersangka karena tersangkut kasus korupsi. DPR pun tak menghalang-halangi penegakan hukum yang dilakukan KPK. Sebaliknya, KPK malah tak menggubris lima rekomendasi Pansus KPK di DPR yang sebetulnya untuk penguatan KPK sendiri. ■ (MH/SC)

Potensi EBT di Sumbar Sangat Bagus

Potensi sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Sumatera Barat dinilai sangat bagus dan cocok sebagai energi hijau atau energi yang ramah lingkungan. Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Sumbar. Gus Irawan Pasaribu usai pertemuan dengan Gubernur Sumbar dan beberapa mitra kerja Komisi VII.

“Arah dari kebijakan pemerintah juga sama, yakni untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Sehingga kami sangat merespon keinginan Gubernur Sumatera Barat yang ingin mengembangkan energi baru terbarukan ini,” ucap Gus Irawan, di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (19/2).

Gus Irawan menyatakan, Komisi VII akan mengawal hal tersebut, agar kebijakan pemerintah tetap konsisten dengan pengembangan energi baru terbarukan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah mempunyai roadmap-nya.

“Kalau tidak ada percepatan dan fokus perhatian kepada energi baru terbarukan, saya pesimis hal

itu akan dapat tercapai. Dari potensi yang dipaparkan Gubernur Sumbar, ke depannya kita akan fokuskan untuk mengembangkan energi baru terbarukan

yang ada di Sumbar, yaitu dari air dan panas bumi,” ujarnya.

Pemakaian batubara yang dilakukan saat ini memang cenderung lebih murah, namun dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, lanjutnya. Dan pada saat lingkungan sudah rusak, maka ada *opportunity cost* yang juga harus ditanggung, tegas politisi Fraksi Gerindra itu.

“Dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan ini bisa disiasati dengan melakukan pemberian insentif bagi mereka yang menggunakan energi baru terbarukan tersebut,” pungkasnya. ■ (DEP/SF)



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

FOTO:DEV

Lahan Asam Hambat Program Cetak Sawah di Papua Barat

Lahan yang terlalu asam selama ini telah menghambat program cetak sawah di Provinsi Papua Barat. Produktivitas padi pun tidak maksimal. Kondisi ini dikeluhkan para petani setempat termasuk irigasinya yang juga tak maksimal mengairi sawah-sawah.

Ini terjadi di Distrik Masni, Desa Boysubur, Kabupaten Manokwari. Delegasi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Michael Wattimena mendengar langsung keluhan para petani setempat, Kamis (15/2). Wattimena menyerukan agar Dinas Pertanian Manokwari membantu mendistribusikan kapur untuk menurunkan kadar asam tanah di lahan persawahan yang dijadikan program cetak sawah.

Pada kesempatan yang sama, Wattimena juga mempertanyakan mengapa irigasi dari Bendung Warior tidak sampai ke lahan cetak sawah di Desa Boysubur. Dijelaskan otoritas

Dalam program cetak sawah ini, petani lokal ikut diperkenalkan pada pertanian padi. Sebelumnya mereka hanya berkebun sagu. Otoritas dinas pertanian setempat juga mengungkapkan, petani lokal selalu berpindah lahan dengan menanam berbagai komoditas.



pertanian Manokwari, ternyata saluran primer irigasinya sedang dalam perbaikan. Di sisi areal cetak sawah memang ada drainase yang mengalir. Namun, itu tidak ditujukan untuk mengairi areal cetak sawah.

Pembukaan areal cetak sawah baru di Manokwari dibantu Dandim setempat. Sosialisasi dan distribusi kebutuhan perlengkapan pertanian juga dilakukan Dandim. Dalam program cetak sawah ini, petani lokal ikut diperkenalkan pada pertanian padi. Sebelumnya mereka hanya berkebun sagu. Otoritas dinas pertanian setempat juga mengungkapkan, petani lokal selalu berpindah lahan dengan menanam berbagai komoditas.

Dengan program cetak sawah ini, petani lokal diajak berkonsentrasi di sawah dengan komoditas padi. Dalam dialognya dengan para anggota Komisi IV, para petani lokal mengaku, pola bertani dengan berpindah lahan ternyata tidak menguntungkan. Sementara itu para transmigran dari Pulau Jawa yang tinggal di Manokwari bisa menularkan kesuksesannya dalam menggarap sawah. Petani transmigran lebih konsisten dalam bertani. ■ (MH,MP)



Wakil Ketua Komisi IV Michael Wattimena memimpin kunjungan kerja ke Manokwari, Papua

FOTO:HUSEIN



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah

FOTO:OBJI

Penangkaran Kura-kura Sarana Pendidikan Konservasi Satwa

Komisi IV DPR RI mendukung upaya unit penangkaran Kura-kura UD Lestari milik Halim Lowii sebagai sarana pendidikan konservasi satwa yang terletak di Jalan Karajalemba Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono usai meninjau lokasi pengembangbiakan kura-kura di Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (19/2).

“Kami datang ke sini untuk mengetahui sejauhmana upaya-upaya pembinaan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah terkait usaha penangkaran kura-kura ini,” ujar Roem.

Politisi Golkar ini menambahkan bahwa upaya pelestarian Kura-kura selain bisa menghasilkan secara ekonomis juga bisa menjadi sarana praktik lapangan para mahasiswa dari Universitas Tadulako Sulteng untuk Fakultas Kehutanan, MIPA, serta Perikanan dan Kelautan. Pelestarian

ini juga bisa menjadi sarana belajar bagi para pelajar, terutama SMK 8 Palu jurusan Kehutanan.

“Perlu kita *support* usaha pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar ini dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya sesuai peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 bahwa izin penangkaran bisa diberikan kepada perorangan, koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi,” jelas Roem.

Ia juga mengharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan bantuan dalam upaya penangkaran kura-kura, karena selain sisi ekonomisnya, bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan konservasi.

Halim Lowii selaku pemilik penangkaran kura-kura UD Lestari menjelaskan, bahwa usahanya sudah

mengantongi izin sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulteng Nomor: SK.304/IV.K-26/1/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang pemberian izin pederang dalam negeri jenis reptil.

“Satwa yang ditangkarkan antara lain Kura-kura Ambon (*Cuora Amboinensis*), Baning Sulawesi (*Indotestudo Forstenii*), Kura-kura Daun (*Leucocephalon Juwonoii*), dan Labi-labi (*Amyda Cartilaginea*) dengan luas area sekitar 2000 m²,” jelas Lowii. Sementara imbuahnya, pembinaan penangkaran secara berkala dilakukan oleh Balai KSDA Sulawesi Tengah sebagai upaya monitoring dan evaluasi baik secara teknis maupun administrasi.

Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Roem Kono dengan anggota antara lain Effendi Sianipar, Rahmat Hamka Nasution, Muhammad Nasyit Umar, Kasriyah, Indira ChundaThita Syahrul, Felicitas Talulembang, Darori Wonodipuro, Asep Ahmad Moushul Affandi, dan Muchtar Luthfi A. Muty. ■ (OJI/sc)

Komisi XI Soroti Penerimaan Pajak Sulsel

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan lebih memperhatikan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai target penerimaan pajak negara. Hal ini ditujukan untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mendistribusikannya merata ke seluruh daerah di Sulsel.



FOTO: GUGUN

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan

“Prestasi pencapaian target pembangunan Sulsel saat ini, walau masih bertumpu pada pertanian, merupakan hasil ketekunan dan kerja keras Pemerintah Daerah, BI, OJK, Perbankan, dan para Kanwil,” kata

Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI rapat dengan Kanwil Kemenkeu Sulawesi Selatan, Kanwil BPK Sulsel, dan Kanwil BPKP di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/2).

Sementara itu, Anggota Komisi XI

DPR RI Utut Adianto menyoroti tentang penerimaan rasio penerimaan pajak yang defisit dari tahun sebelumnya. DJP mengeluhkan rasio petugas pajak dan wajib pajak tak sebanding, sekitar 1 banding 470.

“Makanya kita perlu perhatikan bentuk insentif apa yang dibutuhkan untuk terus menggenjot penerimaan ini. Apalagi Makassar adalah hub-nya Indonesia Timur, makanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mesti didorong dengan volume perdagangan yang diperbesar. Caranya dengan perizinan dipermudah dan *dweeling time* dipercepat,” papar Utut.

Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman mengatakan, penerimaan negara yang bersumber dari pajak harus dioptimalkan oleh Kemenkeu dari tahun ke tahun, dengan melihat realita, kemampuan personil sumber daya manusia, objek pajak, dan PNBP.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR RI menemukan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah teruji membantu penyusunan kualitas laporan keuangan di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai sistem ini memudahkan proses perencanaan pembangunan di daerah, khususnya pada penyaluran dana desa. “Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan SIMDA yang telah dibangun dan dikembangkan oleh BPKP ini,” kata Ecky. ■ (GD/SF)

Larangan *Transshipment* Turunkan Pendapatan Nelayan

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Denpasar, Bali, mendapatkan informasi adanya kebijakan pelarangan bongkar muat kapal ikan di tengah laut atau *transshipment*, telah menurunkan pendapatan nelayan di Bali. Pasalnya, harga jual ikan tuna segar yang dijual di tengah laut lebih tinggi dibandingkan dengan harga ikan tuna beku di darat.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Viva Yoga Mauladi menyayangkan pelarangan *transshipment* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tidak dibarengi

dengan solusi yang jelas dari kebijakan tersebut. Selain itu, banyaknya nelayan yang masih menangkap baby tuna juga harus mendapatkan perhatian khusus, mengingat harga jualnya yang masih

murah dan mengakibatkan hilangnya ikan tuna.

“Ini menjadi masalah buat kita, karena jika nelayan masih banyak menangkap baby tuna, maka ikan tuna akan semakin menghilang dan mengecil jumlahnya. Sehingga nelayan tidak bisa menangkap tuna lagi,” tutur Viva Yoga saat meninjau Loka Riset Perikanan Tuna di Denpasar, Bali, Senin (19/2).

Di sisi lain, politisi F-PAN itu juga mengapresiasi pemerintah dalam upaya budidaya ikan tuna jenis *yellow*



Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

“ Kita melihat kegiatan pertambangan, disamping memberikan kontribusi devisa negara, dan pemasukan negara dari sisi pertambangan, kita juga akan mengawasi sampai sejauh mana perusahaan pertambangan mengapresiasi lingkungan. Karena sepintas kita sudah menyaksikan reklamasi yang mereka lakukan,” papar Yudha saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Adaro di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/2).

Menurutnya, industri batu bara yang digeluti oleh PT Adaro merupakan industri yang destruktif, industri yang mempunyai kontribusi pada emisi karbon yang luar biasa besar. Emisi karbon ini meningkatkan suhu global dengan menjebak energi matahari di atmosfer. Ini mengubah pasokan air dan pola cuaca, perubahan musim tanam untuk tanaman pangan dan mengancam masyarakat pesisir dengan meningkatnya permukaan air.

Emisi karbon memiliki dampak terhadap perubahan iklim, yang dapat

fin di Kabupaten Buleleng yang perlu ditingkatkan efektivitasnya. Karena dari 1.000 telur, yang berhasil menetas hanya sebesar 2 persen saja. Terdapat kendala dari problem genetika dan teknologi.

“Untuk meningkatkan jumlah produksi ikan tuna, Komisi IV akan terus mendorong budidaya ikan tuna dengan cara penambahan anggaran untuk APBN dengan alokasi khusus untuk pengembangan ikan tuna dan pengembangan riset untuk seluruh jenis ikan,” komitmen Viva Yoga.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus (F-PG) menilai, kekurangan anggaran dalam riset dan teknologi di Loka Riset Perikanan Tuna merupakan sebuah ironi.

“Terkait anggaran Loka Riset Tuna ini



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yuda

memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, lokasi bekas galian pertambangan juga harus dipulihkan kembali pasca eksploitasi tambang batu bara.

“Ini pekerjaan yang tidak mudah tapi harus dilakukan, karena sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewajiban mereklamasi tambang pasca penambangan menjadi keharusan,” tandas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Satya mengungkapkan, Pemerintah bisa melakukan tindakan, apabila undang-undang yang dimaksud tidak dipatuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Hal itu juga yang menjadi fokus dan perhatian DPR.

“Maka kita ingin tahu, disamping kita menyaksikan mereka mengekstrak batu bara dengan peledakan. Kita juga akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka beroperasi. Jadi ini yang menjadi hal-hal pengawasan Komisi VII terhadap industri pertambangan,” ungkap politisi asal dapil Jatim itu. ■ (EKO/SF)

merupakan sebuah ironi. Lembaga di bawah Kementerian KKP kekurangan anggaran. Karena serapan anggaran KKP pada 2017 ini hanya 60 persen, padahal lembaga ini sangat butuh banyak anggaran untuk riset dan data,” tutur Ichsan. ■ (RH/SF)



Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi memberikan keterangan pers saat kunjungan kerja ke Denpasar, Bali

Komisi V Temukan Indikasi Kelalaian Pengawasan Tol Becakayu

Komisi V DPR RI menemukan adanya indikasi kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tol Becakayu yang mengakibatkan ambruknya *pierhead* tol tersebut di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (20/2).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengungkapkan hal itu usai mengunjungi lokasi ambruknya *pierhead* tol Becakayu yang menyebabkan 7 pekerja luka parah. Menurut Sigit, sejak *pierhead* roboh pihak konsultan pengawas tidak terlihat di lapangan.

“Dari kunjungan kami di lapangan, kami mendapati pihak konsultan pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sejak *pierhead* roboh sampai kami tiba di lapangan, konsultan pengawas tidak ada di tempat. Ini kan fatal sekali. Konsultan pengawas harus teken persetujuan dulu saat pekerjaan konstruksi dilakukan. Harus ada koordinasi antara kontraktor dan konsultan pengawas,” kata Sigit.

Seperti diketahui, konsultan pengawas memiliki tugas dan kewajiban antara lain melakukan pengawasan administrasi, pengawasan teknik, termasuk pengawasan

rutin terhadap pekerjaan konstruksi. Konsultan pengawas juga memiliki kewenangan untuk menegur pihak kontraktor jika pekerjaannya menyimpang dari kontrak dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

Dalam kunjungan tersebut, Sigit juga meminta pemerintah melalui komite keselamatan konstruksi/ panel ahli untuk segera mengusut dan menjelaskan apa yang menyebabkan kecelakaan kerja ini berulang. Jika standar keamanan dan keselamatan kerja sudah diterapkan sebagaimana diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan Permen

PU No.05/Prt/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, seharusnya kecelakaan kerja bisa dihindari.

“Setiap penyedia jasa konstruksi wajib membuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, dan penanggung jawab. Apakah ini sudah dilakukan dan sudah dievaluasi serta diawasi oleh konsultan pengawas dan PPK? Jika rekayasa teknik sudah dilakukan dan diawasi pelaksanaannya, tentu kecelakaan bisa diminimalisir,” kata Sigit.

Sementara itu, terkait dengan berbagai kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi akhir-akhir ini, Komisi V berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian PUPR dan sejumlah BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi untuk membahas soal keselamatan kerja.

“Sekali lagi, kami menyampaikan keprihatinan atas musibah kecelakaan kerja yang selalu berulang. Saat komisi V meninjau lokasi kecelakaan tadi, kami minta agar penanganan korban diprioritaskan karena masih ada korban yang tertimbun. Dan saya sudah menyampaikan langsung kepada Dirjen Bina Marga bahwa kami akan segera menggelar RDPU dengan PUPR dan BUMN Karya untuk membahas masalah ini. Ini sudah kejadian luar biasa karena berulang,” katanya.

Sigit menegaskan bahwa RDPU akan digelar dalam masa reses ini mengingat kecelakaan kerja bidang konstruksi ini sudah berulang dan merupakan kejadian luar biasa yang harus direspon cepat.

“Memang saat ini DPR sedang reses, tapi ini kejadian luar biasa jadi harus direspon cepat. Saya sudah sampaikan langsung dengan Dirjen Bina Marga agar juga mengikutsertakan BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi dalam RDPU nanti. Kami tinggal menunggu kesiapan pemerintah saja,” kata politisi PKS asal dapil Jawa Timur tersebut. ■ (HS/SC)



Tim Komisi V dipimpin Sigit Sosiantomo saat mengunjungi lokasi ambruknya *pierhead* tol Becakayu di Jakarta Timur

FOTO:HENDRA



FOTO: ANNE

Tim kunjungan Komisi VII DPR RI saat meninjau PLTU Gunung Seriang Tanjung Selor, Kalimantan Utara

PLN Diminta Responsif Atasi Pemadaman Berkala di Kaltara

Anggota Komisi VII DPR RI Ari Yusnita meminta PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih responsif pemadaman listrik, serta mencari solusi jangka pendek terkait penanganan persoalan listrik di Kalimantan Utara (Kaltara). Pasalnya, pemadaman listrik masih terjadi secara berkala.

“Listrik ini merupakan program utama di Kaltara. Saya sangat setuju dengan rencana jangka panjang untuk membangun PLTA Sungai Kayan di Peso. Tapi, sekarang ini solusi jangka pendeknya dulu yang harus dipikirkan,” papar Ari saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di PLTU Gunung Seriang, Tanjung Selor, Kaltara, Selasa (20/2).

Ari memaparkan, pemadaman listrik secara berkala di Kaltara masih terus dikeluhkan masyarakat. Bahkan tidak hanya di daerah yang belum dibangun jaringan listrik, tapi juga di wilayah

perkotaan. Padahal, ketersediaan listrik di Kaltara terbilang surplus.

Hal senada diungkapkan Anggota

“Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN Persero Machnison mengatakan, pemadaman listrik seringkali disebabkan karena persoalan teknis pada penyulang”

Komisi VII Andi Jamaro Dulung. Karena itu, ia meminta PT. PLN Persero untuk menyelesaikan seluruh gangguan jaringan secara bertahap supaya pemadaman yang sering terjadi berangsur berkurang.

Ia juga mendesak pembangunan sejumlah pembangkit baru di Kaltara segera terealisasi, salah satunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gunung Seriang, Tanjung Selor. Ia berharap, keberadaan proyek PLN ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di Kaltara.

Sebelumnya, Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN Persero Machnison mengatakan, pemadaman listrik seringkali disebabkan karena persoalan teknis pada penyulang, utamanya gangguan pohon, gangguan eksternal dan gangguan hewan.

Selain itu, PT. PLN juga belum mampu membangun transmisi jaringan ke seluruh pemukiman penduduk. Saat ini, kondisi kelistrikan kabupaten/kota di Kaltara tahun 2017, yakni Bulungan (Tanjung Selor) 15,39 MW, Malinau 9,26 MW, Tana Tidung 2,62 MW, Nunukan 14,75 MW dan Tarakan 45,80 MW. ■ (ANN/SF)

Mahasiswa Diminta Latih Diri Berwirausaha

Memasuki era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), mahasiswa diminta untuk melatih diri berwirausaha, dan mengembangkan kreativitas dan potensi diri secara optimal. Pasalnya, profil lulusan saat ini yang diharapkan masyarakat, bukan hanya sebatas penguasaan ilmu pengetahuan.

“Saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen diri, tetapi sudah mengarah pada pembentukan jiwa kewirausahaan mahasiswa,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra dalam rilis yang diterima Parlemen, Rabu (21/2).

Tuntutan itu, lanjut politisi F-Gerindra itu, sejalan dengan perkembangan dunia modern yang mengarah pada tumbuh kembangnya ekonomi baru yang bersumber pada kreativitas atau sering disebut dengan istilah ekonomi kreatif. Hal itu penting disadari oleh kalangan perguruan tinggi, bahwa kreativitas

yang dikembangkan selama mahasiswa di kampus menjadi salah satu kunci keberhasilan lulusan.

“Proses kreativitas yang tumbuh dalam perkuliahan akan melahirkan sarjana *entrepreneursip*, mandiri dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Sehingga jiwa wirausaha mahasiswa inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan lulusan, baik secara sosial, ilmu pengetahuan, kompetensi hingga ekonomi mereka nantinya,” jelasnya.

Masih dalam konteks kewirausahaan mahasiswa, Sutan juga meminta kampus menjadi pusat penyediaan (inkubasi) bagi jiwa-jiwa wirausaha yang mandiri. Salah



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

FOTO: JAKA

satu cara yang harus dilakukan kampus adalah dengan menyesuaikan kurikulum yang memancing semangat wirausaha.

“Kampus harus mencari pemasukan bagi operasional mereka, artinya *mindset*-nya harus wirausaha, agar ada pemasukan untuk kemajuan lembaga,” tandas politisi dapil Jambi itu. ■ (RNM/SF)

Sumsel Diminta Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafisz Thohir berharap tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih besar daripada yang dihasilkan. Mengingat, dana dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Sumsel lebih besar dua kali lipat daripada dana APBD seluruh provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkannya usai pertemuan dengan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan mitra kerja Komisi XI DPR RI, dalam rangka dukungan Asian Games 2018 dan pengawasan terhadap kondisi perekonomian Sumatera Selatan, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel, Kamis (15/2).

Hafisz mengatakan, adanya dana sebesar Rp 6,2 triliun yang digelontorkan dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumsel, seharusnya Pemprov Sumsel bisa lebih mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, setidaknya 3,5 basis poin pertumbuhan dari rata-rata pertumbuhan nasional.

Diketahui, selama tahun 2017,

pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan I sebesar 5,14 persen, triwulan kedua naik menjadi 5,26 persen, dan triwulan ketiga mencapai 5,56 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 tercatat 5,05



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafisz Thohir

FOTO: NADYA

persen.

“Sebetulnya cukup membahagiakan, karena di atas rata-rata nasional. Tetapi di lain pihak, perlu dikritisi. Karena sebetulnya kita berharap lebih tinggi daripada itu. Hal ini tentu yang akan kita evaluasi di pusat, bagaimana selanjutnya supaya tidak terjadi yang kurang kita proyeksikan seperti ini,” kata politisi F-PAN itu.

Selain itu, Hafisz juga menyoroti adanya *potential lost* sekitar Rp 7,5 triliun terhadap APBD Sumsel. Hal ini diakibatkan adanya penurunan harga komoditas di sektor pertanian dan kehutanan, juga banyaknya pihak wajib pajak yang berkantor di pusat.

“Akibatnya PPN dan PPH 25 dan 29 itu dilakukan di Kantor KPP yang bersangkutan. Yang kedua adalah, kontraktor-kontraktor pelaku bisnis di sini juga banyak terdaftar di BUMN. Sehingga serapannya kepada masyarakat lokal itu di sini tidak terlalu signifikan,” paparnya.

Sementara terkait gini ratio di Sumsel, Hafisz menuturkan masih di bawah rata-rata gini ratio nasional. Menurutnya, harapan hidup di Sumsel juga masih kalah jauh dibanding nasional. Sehingga, hal ini menjadi tantangan bagi *stakeholder* di Sumsel.

“Tentunya, kita minta pejabat di sini untuk lebih meningkatkan. Dan kami juga sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah Sumsel juga akan terus memantau perkembangan ini. Karena ini merupakan basis awal Sumsel untuk bisa maju,” ungkap politisi dapil Sumatera Selatan itu.

Hafisz menambahkan, tanpa adanya perbaikan gini ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka kesejahteraan masyarakat Sumsel yang diharapkan itu hanya akan dinikmati oleh segelintir masyarakat saja.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan ini, anggota Komisi XI DPR RI, diantaranya Indah Kurnia dan Hendrawan Supratikno dari F-PDI Perjuangan, Edison Betaubun dan M. Nur Purnamasidi dari F-PG, serta Kardaya Warnika, Heri Gunawan, dan Syaiful Rashid dari F-Gerindra.

Berikutnya, Tutik Kusuma Wardhani dan Evi Zainal Abidin dari F-PD, Jon Erizal (F-PAN), Fathan, Bertu Merlas, dan Alamuddin Dimiyati Rois dari F-PKB, Refrizal (F-PKS), Elviana (F-PPP), dan Anarulita Muchtar (F-Nasdem). ■ (NDY/SF)

Pertumbuhan Ekonomi Kepri Menukik Tajam

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2017 hanya mencapai 2,01 persen. Pencapaian ini dinilai menukik tajam, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya tercatat mampu mencapai pertumbuhan di atas 5 persen.



Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng

Hal itu terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Kepri, BPK Perwakilan Kepri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepri, dan Badan Pusat Statistik Kepri, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (15/2).

“Pertumbuhan ekonomi Kepri sangat drop. Padahal pertumbuhan ekonomi ini berdampak langsung pada pendapatan asli daerah (PAD). Ini sangat berbahaya, karena bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng, saat memimpin Tim Kunker.

Menurut politisi F-PG itu, seharusnya pemerintah daerah sudah harus memikirkan potensi lain, selain kegiatan ekspor impor. Karena ekspor

impor Indonesia agak terganggu akhir-akhir ini. Melchi, panggilan akrab Melchias menilai, salah satu sektor yang bisa dikembangkan adalah sektor pariwisata, untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

“Apalagi letak geografis Kepri yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga diharapkan bisa menarik wisatawan dari kedua negara tersebut,” imbuh politisi asal dapil NTT itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Panusunan Siregar menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2017 hanya mencapai 2,01 persen. Padahal pada tahun 2016 tercatat 5,02 persen.

“Selama tahun 2017, perekonomian Kepri mengalami kelesuan dan secara triwulanan hanya tumbuh pada kisaran 2 persen, yang jauh di bawah angka nasional,” jelas Panusunan.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, diantaranya Michael Jeno (F-PDI Perjuangan), Andreas Eddy Susetyo (F-PDI Perjuangan), Andi Achmad Dara (F-PG), Sarmuji (F-PG), Willgo Zainar (F-Gerindra), Nurhayati Ali Assegaf (F-PD), Nur Chayati (F-PKB), Junaidy Auly (F-PKS), dan Achmad Hatari (F-Nasdem). ■ (SF,MP)



Kasus Kekerasan Seksual di Aceh Masih Tinggi

Wakil Ketua sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang merasa prihatin akibat masih tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh. Terutama kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan keluarga.

“Saya cukup terkejut, di Aceh yang biasa kita anggap sebutannya sebagai ‘Serambi Mekkah’ ternyata angka kekerasan seksualnya masih cukup tinggi. Pada tahun ini saja tertabulasi seluruh Aceh memperoleh laporan sebanyak 2000 kasus kekerasan seksual. Ini tentunya sangat memprihatinkan,” ungkap Marwan usai memimpin pertemuan Tim Komisi VIII DPR yang dihadiri Wakil Gubernur

Aceh dan jajaran serta mitra kerja di Kantor Gubernur Provinsi Aceh, Kamis (15/2).

Politisi F-PKB itu merasa prihatin akibat perubahan perilaku di masyarakat yang dinilainya tidak sesuai dengan moral agama dan kemasyarakatan. “Karena sebagian besar tingginya kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak dipastikan dari lingkungan terdekat, maka saya menduga ini akibat dari kurangnya fungsi dan peranan dari pertahanan keluarga itu sendiri,” jelas Marwan.

Lebih dari itu tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh berbanding terbalik dengan minat masyarakat Aceh yang cenderung memilih sekolah berbasis agama dalam menentukan kualitas pendidikan anak.

“Ketahanan keluarga itu salah satunya bisa didapatkan dari pendidikan moral agama, oleh karena itu masyarakat di Aceh ini lebih memilih pesantren sebagai tempat menimba ilmu pendidikan bagi anak-anaknya. Tapi fakta yang kita jumpai di Aceh jumlah pesantren sangat minim dan terbatas sehingga daya tampungnya tidak sebanding dengan tingginya permintaan,” ungkap Marwan.

Oleh karena itu melalui Komisi VIII DPR Marwan mendorong Pemerintah Provinsi Aceh untuk memperbanyak jumlah sekolah agama khususnya pesantren di Aceh dan meminta tempat rehabilitasi yang sesuai bagi para korban kekerasan seksual.



Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang

FOTOTIARA

“Kami berharap pemerintah di sini jangan hanya memikirkan hilir, lebih baik hulunya dulu. Kalau kita tadi menghitung ada keinginan membuat semacam panti rehabilitasi bagi korban, alangkah baiknya jika memperbaiki moral yang diperoleh dari pendidikan agama di pesantren. Oleh karena itu jumlahnya harus diperbanyak,” imbuhnya.

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh meminta Komisi VIII DPR untuk dibuatkan panti rehabilitasi. Panti rehabilitasi tersebut nantinya difokuskan sebagai pusat penyembuhan bagi para korban kekerasan seksual. Sementara itu anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut sebesar kurang lebih Rp 30 miliar.

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Aceh ini bertujuan untuk mendapatkan bahan dan masukan terkait kondisi faktual pelaksanaan program pembangunan khususnya di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh.

Turut serta dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR tersebut anggota Komisi VIII yakni Zulfadhli (F-PG), Rahayu Saraswati, Supriyanto (F-Gerindra), Siti Mufattahah, Syofwatillah Mozaib (F-PD), Asli Cahdir (F-PAN), Bisri Romly (F-PKB), Surahman Hidayat (F-PKS), dan Achmad Fauzan Harun (F-PPP). ■ (TRA/SC)



FOTO:RIZKA

Tim kunjungan kerja Komisi VIII dipimpin Noor Achmad berdiskusi dengan masyarakat di Papua Barat

PKH Harus Sampai di Pelosok Negeri

Komisi VIII DPR RI mempunyai moto, tidak boleh ada seorang pun masyarakat Indonesia yang tidak sejahtera. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad mengatakan, pihaknya selalu berkomitmen untuk menyejahterakan keluarga di pelosok nusantara, baik peningkatan kualitas sekaligus kuantitas bantuan terhadap masyarakat.

“Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula hanya 10 juta, akan kita tingkatkan menjadi 15 juta per keluarga. Itu artinya, jangan sampai ada orang miskin di Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan,” tegas Noor Achmad, saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Papua Barat, Kamis (15/2).

Politisi F-PG itu mengaku, pihaknya terkejut dengan kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat. Ia mempertanyakan apakah selama ini tidak ada laporan, padahal Komisi VIII sudah mencoba memberikan bantuan kepada masyarakat.

Sementara saat pertemuan di Kantor Walikota Sorong, Noor Achmad menjelaskan bahwa bantuan sudah siap, tetapi memerlukan data dan masukan agar peruntukannya jelas,

“Adapun bantuan masyarakat tertentu, khususnya mereka yang masih tertinggal dan terpinggirkan di Papua Barat ini jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu, kunjungan ini sekaligus untuk menggugah teman-teman di Papua Barat, khususnya Sorong ini, mana yang masih tertinggal dan belum dapat sentuhan dari pemerintah,” jelas Noor Achmad.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kantor Wilayah

Kementerian Agama Sorong menginginkan agar fungsi agama ditingkatkan. Termasuk di dalamnya pembinaan umat dan perijinan rumah ibadah. Diakui bersama, hal ini merupakan hal yang signifikan dalam keseharian masyarakat sebagai umat beragama.

“Penting sekali, karena banyak berhubungan dengan fungsi untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Karena kita khawatir sekali, kalau kemudian ada oknum yang memecah belah bangsa ini dari aspek agama,” jelas Noor Achmad.

Terkait bencana alam yang terjadi di Kota Sorong, Noor Achmad memastikan ketersediaan dana darurat yang siap digunakan. Saat ini, tersedia dana *on call* kurang lebih sebesar Rp 6 triliun, yang bisa langsung dipakai. “Sehingga kalau ada bencana, pasti langsung ditangani oleh BNPB,” ujarnya.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun mengimbau agar masyarakat maupun pemerintah dapat memberikan informasi selekas mungkin jika terjadi bencana alam, sehingga segera mendapat bantuan, dan BNPB dapat bertindak menangani sesegera mungkin. ■ (RAN/SF)



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf di sidang Forum 6th OECD Parliamentary Days di Paris, Perancis

Globalisasi Harus Membawa Manfaat

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) menyampaikan bahwa globalisasi harus membawa manfaat bagi semua masyarakat dunia. Kerjasama-kerjasama multilateral, terutama kerjasama perdagangan internasional, tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, namun lebih pada pemerataan kesejahteraan.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Delegasi DPR RI dalam sesi diskusi dengan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría, mengenai multilateralisme dan upaya menjembatani ketimpangan ekonomi, pada forum 6th OECD Parliamentary Days di Paris, Perancis, 7 - 9 Februari 2018 lalu. Hadir dalam forum ini, lebih dari 100 anggota parlemen dari 40 negara melakukan diskusi interaktif untuk mengeksplorasi solusi-solusi kebijakan berdasarkan riset dan studi kasus.

“Tata kelola global harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan sosial, keterbukaan dan transparansi. Dalam sistem multilateral, kepentingan nasional harus seiring sejalan dengan situasi global, namun tentunya tanpa

mengorbankan kepentingan dalam negeri. Sehingga pemilih yang mempercayakan suaranya pada kami tidak kehilangan kepercayaan akan sistem global dan tetap mau mengambil bagian dalam demokrasi,” papar politisi F-PD itu.

Menanggapi intervensi Nurhayati, Angel Gurría menyatakan pandangan yang sama dan sangat menghargai peran DPR RI terutama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Global. Inisiatif World Parliamentary Forum on SDGs yang diselenggarakan di Bali tahun lalu, mendapat perhatian dari OECD dan OECD berminat untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan forum tersebut tahun ini.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua BKSAP Siti Hediati Hariyadi dalam sesi Kebijakan Pendidikan bagi Penguatan Kepercayaan Publik menyampaikan, bahwa Indonesia memandang penting pendidikan, sehingga berbagai upaya telah dilakukan di dalam negeri, baik dalam bentuk kebijakan publik maupun penganggaran.

Terkait kepercayaan publik, Titik, panggilan akrab Siti Hediati, menekankan bahwa di era digital ini, masih ada pekerjaan rumah untuk mengedukasi publik akan bahaya hoaks dan berita palsu yang dapat mengikis ketahanan sosial masyarakat.

Selanjutnya dalam sesi Berinvestasi dalam Pengelolaan Iklim-Berinvestasi bagi Pertumbuhan Ekonomi, Wakil Ketua BKSAP Nurhayati Monoarfa (F-PPP) menyampaikan perkembangan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan upaya pembangunan lingkungan secara berkelanjutan di dalam negeri.

Masih dalam forum itu, juga dibahas mengenai kebijakan perpajakan dan tantangan perpajakan sejalan dengan perkembangan ekonomi digital. Selain itu, disampaikan pula mengenai kemajuan kerja OECD untuk memperbaiki kerja sama perpajakan internasional melalui program inisiatif Base Erosion and Profit

Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI).

Anggota BKSAP DPR RI Vanda Sarundajang (F-PDIP), menyampaikan intervensi mengenai kesiapan Indonesia dalam menerapkan OECD Common Reporting Standard (CRS) untuk meningkatkan transparansi perpajakan dan kerangka legislasi nasional yang kondusif bagi implementasi CRS.

Menanggapi hal itu, OECD menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia yang telah memiliki berbagai perangkat legislasi yang mendukung CRS. OECD juga menyinggung bahwa sebagai key partner OECD, program pengampunan pajak yang telah dilakukan Indonesia merupakan sebuah studi kasus yang menarik. Berdasarkan data OECD, *voluntary disclosure regime* yang dijalankan mampu mengungkap aset-aset tersembunyi hingga 360 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan terpisah, Nurhayati berdiskusi langsung dengan Sekjen OECD mengenai kerjasama OECD dan DPR RI dalam penyelenggaraan the 2nd World Parliamentary Forum on SDGs pada tanggal 12-13 September 2018. Sebagai follow-up, Nurhayati juga melakukan pertemuan dengan Antony Gooch, Director Public Affair, dan Kumi Kitamori, Head Division Green Growth OECD, guna membahas lebih lanjut mengenai kolaborasi tersebut.

OECD Global Parliamentary Network bertujuan untuk menghubungkan legislator dengan hasil kerja OECD yang dapat mendukung upaya kebijakan di tiap negara anggota, dan kegiatan dimana para peserta dapat saling berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam penyusunan maupun penerapan suatu kebijakan.

Pertemuan Global Parliamentary Network diselenggarakan oleh OECD bersama dengan NATO Parliamentary Assembly dan dengan partisipasi Women Political Leaders Global Forum. Pertemuan membahas berbagai tema yang menjadi fokus riset OECD antara lain peran G-20 dalam pertumbuhan inklusif, energi baru terbarukan, hingga tema yang sangat dekat dengan tugas-tugas wakil rakyat yaitu Tatacara Baru dalam Berpolitik: Upaya Menyusun Kebijakan Bersama dengan Konstituen. ■ (SF)

“Masih ada pekerjaan rumah untuk mengedukasi publik akan bahaya hoaks dan berita palsu yang dapat mengikis ketahanan sosial masyarakat”



Kepala Biro Persidangan I Setjen dan BK DPR RI Dimiyati Sudja menerima kunjungan DPRD Kota Makassar

FOTO:ARIEF

Perlu Berbagai Pertimbangan dalam Pelaksanaan Reklamasi

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimiyati Sudja menerima kunjungan DPRD Kota Makassar, dalam rangka konsultasi terkait informasi aturan mengenai reklamasi. Dimiyati mengatakan, dalam melaksanakan reklamasi, memerlukan berbagai pertimbangan.

“KITA harus pertimbangkan banyak hal seperti perizinan, bentuk kerja sama, perlindungan terhadap petani-petani mutiara, dan warga sekitar. Banyak masalah yang harus diselesaikan dalam masalah reklamasi ini,” kata Dimiyati di Gedung Setjen dan BK DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2).

Dimiyati menilai reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan manfaat sumber daya lahan, untuk itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertimbangkan kehidupan warga yang tinggal di wilayah reklamasi, agar tidak ada pihak yang dirugikan serta masalah di kemudian hari.

Sementara terkait reklamasi Pantai Losari di Makassar yang dinilai beberapa pihak lebih banyak merugikan warga di lingkungan sekitar, karena dianggap menyebabkan kerusakan lingkungan di pesisir pantai selatan Makassar dan terancam abrasi dalam beberapa tahun mendatang, Dimiyati akan meneruskan aspirasi DPRD Makassar ini ke Komisi II terkait pertanahan nasional, Komisi III perihal hukum, Komisi IV dalam menangani kelautan, dan Komisi V terkait infrastruktur.

Audiensi ini juga diikuti Tenaga Ahli (TA) Komisi V DPR RI. Dengan kehadiran TA Komisi IV, Dimiyati berharap aspirasi DPRD Makassar itu dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

“Dengan adanya TA Komisi V di pertemuan ini akan sangat membantu. Nanti mereka bisa menilai, apakah komisinya perlu melakukan kunjungan untuk meninjau langsung ke tempat tersebut,” tutup Dimiyati. ■ (APR/SF)

Masukan PWI Terkait UU MD3 Akan Dibawa ke Baleg

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo mengatakan akan menyampaikan dan membawa saran serta masukan yang disampaikan oleh insan pers terkait pro kontra UU MD3 ke Badan Legislasi.

“Tentu UU ini ada hal yang tidak sempurna sesuai dengan keinginan semua pihak, maka dari itu tentunya dari pertemuan ini kita melihat ada kelemahan. Nah kelemahan ini kita coba carikan jalan keluar bersama,” ujar Firman usai mendampingi Ketua DPR RI bertemu PWI di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (20/2).

Ia melanjutkan, pertemuan dengan PWI tentu tidak lepas dari terobosan dan kelebihan Ketua DPR RI yang mempunyai *background* sebagai wartawan sehingga persoalan yang menyangkut sensitifitas tinggi bisa dikomunikasikan secara langsung. “Pimpinan DPR hadir di markas besar PWI dan Dewan Pers ini untuk mencoba mendengarkan dan merespon

secara lebih dekat,” ungkapnya.

Politisi F-Golkar ini, menyatakan UU Pers No 40 Tahun 1999 perlu dijunjung tinggi tentang kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya. “Seperti yang ditegaskan Ketua DPR, kalau keberadaan UU MD3 tidak akan memberangus kebebasan pers. Kemungkinan akan kita buat pengecualian terhadap pers

Setjen DPR Sarankan DPRD Buol Susun Aturan Kode Etik

Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indryana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, untuk segera menyusun aturan kode etik. Hal ini terkait salah satu anggota DPRD Buol yang tertangkap tangan menyalahgunakan narkotika.

Demikian diungkapkan Cholida saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Buol di ruang rapat Biro Persidangan II, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2). Dalam kesempatan itu, Cholida didampingi Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Yusuf.

“Yang menjadi permasalahan, DPRD Buol belum mempunyai aturan terkait peraturan kode etik dan tata beracara untuk menindak anggotanya. Kami sarankan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di DPRD Buol agar bisa membantu untuk proses pembuatan perihal tersebut,” tambah Cholida.

Saran lain diungkapkan oleh Tenaga Ahli MKD Yusuf, agar DPRD Buol dengan segera membentuk pansus untuk menyusun kode etik. Mengingat sudah



Kepala Persidangan II Setjen dan BK DPR RI Cholida Indryana saat menerima kunjungan DPRD Buol

FOTO:AZKA

mendekati tahun politik, agar seluruh kegiatan anggota DPRD dapat diatur dan bisa berjalan dengan lancar.

Pertemuan yang dihadiri enam orang anggota DPRD Buol ini menghasilkan poin penting bahwa tiap

DPRD harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. ■ (CAS/SF)



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo

FOTO:JAVADI

dalam tata tertibnya nanti,” jelas Anggota Dewan dapil Jawa Tengah III ini.

Sementara itu Plt Ketua Umum PWI Sasongko Tedjo mengatakan, UU MD3 terutama Pasal 122 bisa dikategorikan sebagai upaya untuk mengecam kebebasan pers. “Kita meminta Pak Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR RI dan juga sebagai kolega bahwa ini berbahaya serta besarnya arus penolakan dari masyarakat terhadap UU ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam pertemuan di Kantor PWI tersebut memberikan beberapa solusi yakni salah satunya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan

“Pertemuan dengan PWI tentu tidak lepas dari terobosan dan kelebihan Ketua DPR RI yang mempunyai *background* sebagai wartawan sehingga persoalan yang menyangkut sensitifitas tinggi bisa dikomunikasikan secara langsung”

meminta adanya jaminan tentang kebebasan ini. “Kalau tidak menyalahi hukum ketatanegaraan, kita meminta adanya MoU DPR dengan PWI untuk kebebasan pers,” pungkasnya. ■ (MHR/SC)

Keberadaan SAA Dukung Kinerja Dewan

Kemajuan teknologi di bidang digital, tidak menutup kemungkinan untuk para anggota DPR dalam membutuhkan kinerja yang lebih cepat dan lebih baik. Keberadaan para Staf Administrasi Anggota (SAA) DPR RI dinilai sangat dibutuhkan sebagai daya dukung kinerja anggota maupun DPR sebagai institusi. Apalagi, pekerjaan anggota DPR RI bisa dibilang tidaklah ringan.

Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti saat membuka acara Orientasi/Pembekalan Staf Administrasi Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2018, Senin (19/2). Acara yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta itu, diikuti kurang lebih 104 SAA.

“Selain membutuhkan data administrasi, anggota dewan juga membutuhkan berbagai rujukan literatur dan anggaran untuk menunjang kerjanya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks ini, peran SAA menjadi sangat penting dan strategis

dalam melancarkan semua kebutuhan anggota dewan,” jelas Maya, panggilan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, Maya juga menyinggung mengenai pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) yang bekerja sama dengan KPK sejak 2017 secara online. Hal ini semata-mata untuk mempermudah anggota dewan dalam mengisi LKHPN.

“Harapan ke depannya, pembekalan seperti ini akan diagendakan kembali bagi SAA yang tidak bisa hadir, dikarenakan pentingnya pembekalan orientasi seperti ini, guna meningkatkan kinerja anggota DPR RI semakin baik di hadapan publik,”

harap Maya.

Acara pembekalan atau orientasi ini berlangsung selama dua hari. Banyak materi yang akan diberikan kepada para SAA, diantaranya materi kepribadian dan materi peraturan yang berlaku di DPR. Serta diberikan materi *ESQ Leadership*, guna menunjang kinerja SAA untuk lebih mendalami materi orientasi ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko yang hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, mengharapkan para SAA bisa memanfaatkan semaksimal mungkin orientasi ini.

“Para SAA harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin orientasi ini, bagaimana harus bersikap dan bekerja dengan baik dan memahami betul kemajuan sistem teknologi pada parlemen modern,” harap Djaka. ■ (SOE/SFI)



Plt. Setjen DPR RI Damayanti bersama Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Djaka Dwi Winarko

FOTO: JAYADI



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memberikan keterangan pers

FOTO:RUNI

Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Tandatangani UU MD3

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, revisi kedua UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 harus berlaku. Setelah masuk dalam lembaran negara, maka UU ini harus ditaati oleh semua orang.

Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/2) terkait UU MD3 yang menuai protes dari masyarakat karena dianggap UU ini memasing demokrasi dan memperkuat lembaga DPR.

Dijelaskan Fahri, UU hasil revisi ini dibahas cukup lama antara DPR dengan pemerintah dan disahkan pekan lalu. Awalnya revisi atas UU MD3 hanya untuk menambah kursi pimpinan DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly setelah melaporkan soal UU MD 3 kepada Presiden Jokowi di kantor presiden kemarin menyampaikan, Presiden Jokowi cukup kaget mendengar laporannya.

Disampaikan juga, presiden belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani UU MD3.

Namun Fahri Hamzah berpendapat, tidak etis jika sampai presiden tidak menandatangani UU MD3. "Presiden mau apa? Ini soal pikiran, jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan," kata Fahri sembari menambahkan, muatan UU MD3 yang direvisi adalah buah pikiran yang benar. Sayangnya menurut politisi PKS ini, kita belum punya pemikir ketatanegaraan, sehingga banyak kekacauan.

Menurutnya, belum ditandatanganinya UU MD3 oleh Presiden Jokowi bukan mau citra-citraan. Dirinya

mengaku bisa mengerti kalau Presiden Jokowi belum menteken UU MD3 sebagai pemberlakuan setelah disahkan DPR bersama pemerintah. "Bisa dimengerti karena ini memang berat, tetapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas," kata Fahri.

Dikatakan lagi, falsafah UU MD3 memang berat, sehingga jika belum seorang negarawan maka mereka tidak akan paham isi pasal-pasal UU MD3, "Tak ada yang berani menjelaskan ke presiden," katanya.

Padahal menurut dia, hak imunitas itu sudah ada dalam UUD 1945, bukan di UU MD3, sehingga hak imunitas anggota DPR sudah ada sejak dulu. Di seluruh dunia pun anggota parlemennya memiliki hak imunitas, diberi kekuatan supaya kuat mengawasi pemerintah yang kuat juga.

Fahri membantah setelah UU MD3 ini maka DPR anti kritik, DPR membungkam demokrasi dan sebagainya. "Tidak ada sejarahnya DPR kita anti kritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum nyampai sehingga tidak paham filsafatnya," kata Fahri. ■ (MH/SC)



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima kunjungan dari Bang Japar (Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara) dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III. Senin (19/2). Foto : Runi/hr



Tim Kunker Komisi V dipimpin Wakil Ketua Komisi V Anton Sukartono Suratto meninjau lokasi longsor di Kampung Maseng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Selasa, (20/2). Foto : Hendra/hr



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad berdialog dengan warga Distrik Salawati Tengah, Pulau Salawati, Papua Barat, Jumat (16/2). Foto : Rizka/hr